



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MAKMUR DAN DESA MEKAR JAYA
DI KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya tentang pemekaran maka perlu adanya Pembentukan Desa di setiap Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, kondisi Desa, kondisi sosial Budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa baru disetiap Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah;
 - d. bahwa pembentukan Desa-desanya baru di wilayah Kecamatan Angsana adalah merupakan wujud aspirasi dan kehendak masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya Di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MAKMUR DAN DESA MEKAR JAYA DI KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati bagi Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Orang atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada Kepala Daerah dan membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: Sekretariat Daerah, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
10. Pengawasan adalah Pengawasan Refresif yang berdasarkan Supremasi Hukum untuk memberi kebebasan pada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan.
11. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tertentu yang menjadi beban Daerah.
12. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Luas Wilayah Daerah adalah luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk Daerah Kabupaten.
14. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan meningkatkan Pelayanan Publik, Proses Pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DESA, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Desa Makmur berasal dari sebagian wilayah Desa Bayan Sari terdiri atas: Dusun I, Dusun II; RT I s/d RT 06, dengan Luas Wilayah± 1.200 Ha.

Pasal 5

Desa Mekar Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Indah yang terdiri atas:Dusun I, Dusun II; RT I sd RT 16, dengan Luas Wilayah ± 1.280 Ha.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, luas wilayah yang dibawahi Desa Bayan Sari akan berkurang dengan luas wilayah Desa Makmur.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah yang dibawahi Desa Karang Indah akan berkurang dengan luas wilayah Desa Mekar Jaya .

Pasal 8

- (1) Desa Makmur mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Banjar Sari;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bayan Sari;
- (2) Desa Mekar Jaya mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Banjarsari;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bunati;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Indah;
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Kewenangan Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya Mencakup Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan dari Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Bahwa segala pembiayaan yang timbul akibat dari adanya Pembentukan Desa tersebut, dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan Desa yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bahwa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan dari Pembentukan Desa, tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Keputusan Bupati yang Menetapkan tentang Pembentukan Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Oktober 2010

BUPATI TANAH BUMBU,
ttd
MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MAKMUR DAN DESA MEKAR JAYA DI KECAMATAN
KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU**

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas wilayah \pm 5.066,95 KM² dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 berjumlah \pm 208.573 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa Bayan Sari perlu dibentuk desa baru, yaitu: Desa Makmur yang luas wilayah 1.200 Ha dengan jumlah penduduk 708 jiwa.

Dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa Karang Indah perlu dibentuk Desa baru, yaitu: Desa Mekar Jaya yang luas wilayah \pm 1.280 Ha dengan jumlah penduduk 1.902 jiwa.

Dengan luas wilayah seperti tersebut diatas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali Pemerintahan melalui Pembentukan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (3)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Penentuan batas wilayah Desa Makmur dan Desa Mekar Jaya secara pasti dilapangan, ditetapkan oleh Bupati yang dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Desa Bayan Sari dan Desa Karang Indah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010 NOMOR 35**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2010**



TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MAKMUR DAN DESA MEKAR JAYA
DI KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010**